

## ABSTRACT

Budi Haryadi, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Djuanda, 2022, **Implementation of the Policy for the Elimination of State Property at the Ciloto Health Training Center**, 1<sup>st</sup> Supervisor: Drs. Goris Gotfridus Seran, M.Sc., 2<sup>nd</sup> Supervisor: Irma Purnamasari S.Sos., M.Sc.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2008 concerning the Management of Regional State Property (BMN) article 2 Paragraph 1 includes: planning needs, budgeting, procurement, use, utilization, security, maintenance, assessment, elimination, transfer, administration, supervision and control. The problems studied are how to implement the State Property policy at the Ciloto Health Training Centre, the obstacles and efforts in implementing the BMN elimination policy.

This study aims to determine the policy implementation for the Elimination of State Property. The research method used is descriptive quantitative literature study and field study. This theory refers to the opinion of Merilee S. Grindle (Nawawi 2009). Furthermore, the results of the study were analysed through a descriptive analysis method which describes the level of policy implementation for the Elimination of State Property and conducted to obtain information about the current condition.

The results of the policy implementation on the elimination of State Property shows the final results of the study with an average value of 3.92 with good assessment criteria. Good communication between goods users and goods managers facilitates the implementation of elimination, increasing the competence of the human resources involved. Suggestions from this research are: 1) Improving the quality and quantity of human resources; 2) Effective communication between goods users and goods managers

Keywords: Implementation of State Property Elimination Policy



## ***ABSTRAK***

Budi Haryadi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Djuanda,2022, **Implementasi Kebijakan Penghapusan Barang Milik Negara di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto**, Pembimbing I : Drs Goris Gotfridus Seran, M.Si., Pembimbing II : Irma Purnamasari S.Sos., M.Si.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Daerah pasal 2 Ayat 1 meliputi: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian. Permasalahan yang di teliti adalah bagaimana implementasi kebijakan Barang Milik Negara pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, kendala dan upaya dalam implementasi kebijakan penghapusan BMN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penghapusan Barang Milik Negara. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif studi kepustakaan dan studi lapangan. Teori ini mengacu kepada pendapat Merilee S. Grindle ( Nawawi 2009). Selanjutnya hasil penelitian di analisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan tingkat Implementasi Kebijakan Penghapusan Barang Milik Negara.Yaitu penelitian yang di lakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi saat ini.

Hasil pelaksanaan kebijakan penghapusan Barang Milik Negara menunjukan hasil akhir penelitian dengan nilai rata-rata 3.92 dengan kriteria penilaian baik. Komunikasi yang baik antara pengguna barang dan pengelola barang mempermudah pelaksanaan penghapusan, peningkatan kompetensi SDM yang terlibat.

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. Komunikasi yang efektif antara pengguna barang dengan pengelola barang

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Penghapusan Barang Milik Negara